

Mochammad Ilyas  
Junjunan<sup>1</sup>, Ajeng Tita  
Nawang Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jalan  
Ahmad Yani Nomor 117, Kota Surabaya,  
Jawa Timur 60237  
Email: mjj@uinsby.ac.id

# *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa*

DOI: 10.18196/berdikari.v9i2.10107

## **ABSTRACT**

The village fund law has mandated the government to allocate village funds for the welfare of the community in the village. Public understanding of the importance of accountability must be reported to the state is the main focus of this community service activity. This empowerment activity aimed to increase public understanding of the management and reporting funds in the Kebonsari Village, Candi, Sidoarjo Village. The program applied to learn by doing method in the form of practical learning. Activities were carried out in stages, including gathering information, implementing socialization & training, mentoring, monitoring the management, and reporting activity funds for the community. The results showed an increase in the understanding and ability of community members in managing and reporting community activity funds in Kebonsari Village with entrepreneurial activities (salted eggs), handicrafts (Sayangan), and animal husbandry (Bebek Village). A total of 17 people out of 21 residents felt the beneficial impact of the activities was shown by the level of community satisfaction. Therefore, this activity should be promoted further with a different focus according to the problems found in the community to maintain and improve accountability culture by upholding the values of integrity and transparency in the management and reports of village funds in the future.

Keywords: village funds, financial management, micro, small and medium enterprises

## **ABSTRAK**

Undang-undang dana desa telah memberikan mandat pemerintah untuk mengalokasikan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya bentuk pertanggungjawaban dana kegiatan yang harus dilaporkan kepada negara menjadi fokus utama kegiatan pengabdian terhadap masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan di lingkungan desa Kebonsari, Candi, Sidoarjo. Metode yang diterapkan *learning by doing*, dalam bentuk *practical learning*. Kegiatan dilakukan secara bertahap meliputi penggalan informasi, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, hingga pendampingan dan monitoring tentang pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan bagi masyarakat. Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan warga masyarakat dalam pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan masyarakat di Desa Kebonsari yang memiliki kegiatan usaha wirausaha (telur asin), kerajinan (sayangan), dan peternakan (kampoeng bebek). Sejumlah 17 orang dari 21 warga yang merasakan dampak kebermanfaatannya dari adanya kegiatan pengabdian yang ditunjukkan oleh tingkat kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan ini akan terus bisa digalakkan dengan fokus yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga budaya akuntabilitas dengan menjunjung

tinggi nilai integritas dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa di masa yang akan datang bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan.

Kata Kunci: dana desa, pengelolaan keuangan, usaha mikro kecil menengah

---

## PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah guna mengalokasikan dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Astuti & Yulianto, 2016). Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Saud & Trisha, 2020). Pengelolaan dana desa melibatkan peran pemerintah desa dan lembaga tingkat desa hingga warga masyarakat yang ada di desa tersebut.

Lingkungan masyarakat di tingkat rukun tetangga (RT) menjadi fokus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui anggaran dana desa. Bentuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di antaranya adalah adanya kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar pengurus RT beserta warga masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan didominasi oleh warga masyarakat yang menerima anggaran dana kegiatan yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas merupakan bentuk dorongan psikologi seseorang untuk berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya (Budiman, Yusnaini, & Relasari, 2019).

Kendala yang umum ditemui terkait pengelolaan dana kegiatan adalah bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam melaporkan biaya-biaya pelaksanaan kegiatan (Adhitama, 2015), khususnya di tingkat warga masyarakat penerima dana kegiatan yang mayoritas awam dengan kewajiban pelaporan biaya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan lingkungan. Hal ini terlihat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terutama di Desa Kebonsari yang kesulitan menyelesaikan pelaporan keuangan kegiatan pada aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Kebonsari memiliki sejumlah 2.211 keluarga yang tersebar di tiga dusun dan berfokus pada kegiatan wirausaha di bidang padat karya, beternak, dan kerajinan. Berdasarkan hasil penggalan informasi dari perangkat desa, kendala yang dihadapi oleh

warga adalah mayoritas warga mengalami kesulitan pada pengelolaan dana kegiatan yang bersumber dari anggaran dana desa. Kesulitan dialami karena tidak semua warga desa mendapatkan pendidikan formal atau pelatihan tentang tata cara pengelolaan dan pelaporan keuangan sehingga tidak semua warga memahami mengenai proses pengelolaan dan pelaporan dana desa. Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap pengelolaan dana desa ditemukan dalam penelitian yang membahas tentang pengelolaan dan pelaporan dana desa. Meutia & Liliana (2017) yang meneliti tentang pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami masalah pengelolaan dana desa. Sementara itu, kendala kurangnya pelatihan dan literasi tentang pengelolaan dan pelaporan dana desa juga ditemukan pada penelitian lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim & Yudianto (2018) pada desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa pada desa-desa tersebut literasi baik yang berbentuk pelatihan (*workshop*) maupun seminar pengelolaan dana desa masih terbatas sehingga hal tersebut menjadi temuan dan penekanan penting dalam penelitiannya. Hal ini juga sejalan dengan yang terjadi di Desa Kebonsari, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Oleh karenanya, peneliti merasa penting untuk melakukan pendampingan terkait pengelolaan dan pelaporan dana desa, terutama pada pertanggungjawaban biaya-biaya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan wawasan dan metode pengelolaan serta pelaporan dana kegiatan kepada warga masyarakat di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian dilakukan di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo selama bulan November 2019 sampai dengan Februari 2020. Target kegiatan pengabdian adalah seluruh warga masyarakat yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang perwakilan setiap rukun tetangga yang tersebar di Desa Kebonsari. Pelaksanaan pengabdian berfokus pada peningkatan pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bagi warga melalui program yang terlaksana di bidang kewirausahaan telur asin, kerajinan produk *sayangan*, dan peternakan *kampoeng bebek*. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut.

## 1. Penggalan Informasi

Tahap ini dimulai dengan kegiatan bersilaturahmi kepada perangkat desa Kebonsari, bersama sekretaris desa dan pelaksana tugas Desa Kebonsari. Hal ini dalam rangka mencari informasi tentang warga yang menerima anggaran dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dana desa yang diberikan kepada warga dalam bentuk pengembangan usaha di bidang wirausaha, kerajinan, dan peternakan. Selain itu, observasi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dan dokumentasi dengan bendahara desa guna mendapatkan informasi tentang progres warga masyarakat yang sudah memberikan pertanggungjawaban atas dana kegiatan yang sudah terlaksana.

## 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Pelaporan Dana Kegiatan

Tahap ini dimulai dengan mengundang warga Desa Kebonsari yang menerima anggaran dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah Desa Kebonsari terkait kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban dana tersebut. Kemudian, sebelum dilaksanakan pelatihan, peserta diminta mengisi *pretest* guna menganalisis tingkat pemahaman warga masyarakat awal terhadap pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan (Natawibawa, Mulya, & Yoh, 2019). Warga masyarakat perwakilan setiap rukun tetangga yang menerima dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diundang sejumlah 21 orang. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan di Balai Desa Kebonsari.

## 3. Pendampingan dan Monitoring

Tahap pendampingan dan monitoring dilakukan untuk mengukur keberhasilan peningkatan warga masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Tahapan ini dilakukan dengan visitasi kepada warga masyarakat dan menyebarkan kuesioner untuk melihat respon terhadap sosialisasi dan pelatihan yang sudah diberikan. Selain itu, warga juga diberikan *posttest* guna mengukur sejauh mana tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan masyarakat.

Analisis data yang dilakukan dari kegiatan pengabdian menggunakan data perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi dan pelatihan (Budiman *et al.*, 2019). Selain itu, analisis juga dilakukan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil kepuasan warga masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan selama pengabdian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian dilaksanakan melalui bentuk sosialisasi, pelatihan, dan monitoring langsung kepada warga masyarakat di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola dan melaporkan penerimaan anggaran dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kewirausahaan, kerajinan, dan perternakan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi & Muliastari (2020) yang juga melakukan pendampingan pengelolaan keuangan di Desa Mlandi, Wonosobo, Jawa Tengah. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini ada monitoring untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendampingan dan mengidentifikasi permasalahan riil dalam pelaksanaan pendampingan sehingga di masa yang akan datang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pendampingan berikutnya dalam mengidentifikasi fokus dan permasalahan yang ada.

Beberapa tahap yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan pengelolaan dana desa di Desa Kebonsari, Candi, Jawa Timur adalah sebagai berikut.

### **1. Penggalan Informasi**

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah penggalan informasi dari perangkat Desa Kebonsari dan pelaksana tugas desa karena pada saat itu Desa Kebonsari masih mengalami masa transisi kepemimpinan sehingga Lurah yang seharusnya menjadi kepala desa digantikan sementara oleh pelaksana tugas dari pegawai negeri Kecamatan Candi. Penggalan informasi ini bertujuan untuk mencari data warga masyarakat yang mendapatkan anggaran dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kebonsari. Selain itu, diskusi juga membahas potensi usaha yang menjadi fokus anggaran dana kegiatan di Desa Kebonsari di bidang kewirausahaan telur asin dan peternakan bebek menjadi prioritas desa karena usaha tersebut menjadi salah satu ikon *kampoeng bebek* Desa Kebonsari. Sementara itu, kerajinan atau istilah yang terkenal di Kebonsari adalah usaha *sayangan* menjadi bagian penting bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kebonsari.

Observasi lainnya dilakukan dengan bendahara pemerintah Desa Kebonsari untuk mendapatkan data warga masyarakat yang telah melaporkan anggaran dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2019.

### **2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan & Pelaporan Dana Kegiatan**

Peserta sosialisasi dan pelatihan adalah warga masyarakat yang menerima anggaran

dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, warga masyarakat mayoritas memiliki usaha di bidang kewirausahaan telur asin dan peternakan *kampoeng bebek*, serta kerajinan *sayangan* berjumlah 21 orang. Jumlah ini didapatkan dari hasil *pretest* karakteristik warga Desa Kebonsari yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

**Tabel 1. Karakteristik Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Dana Kegiatan**

| <i>Data Sosialisasi &amp; Pelatihan Warga Desa Kebonsari</i> |                             | <i>Frequency</i> | <i>Percent</i> |
|--|-----------------------------|------------------|----------------|
| <i>Jenis kelamin</i>   | Laki-laki                   | 12               | 57.1           |
|  | Perempuan                   | 9                | 42.9           |
|  | Total                       | 21               | 100.0          |
| <i>Jenis usaha</i>   | Telur Asin                  | 7                | 33.3           |
|  | Kerajinan Sayangan          | 8                | 38.1           |
|  | Peternakan (Kampoeng Bebek) | 6                | 28.6           |
|  | Total                       | 21               | 100.0          |
| <i>Usia warga</i>  | 20-30 Tahun                 | 3                | 14.3           |
|  | 31-40 Tahun                 | 6                | 28.6           |
|  | 41-50 Tahun                 | 10               | 47.6           |
|  | Diatas 50 Tahun             | 2                | 9.5            |
|  | Total                       | 21               | 100.0          |
| <i>Pengalaman membuat Laporan penggunaan Biaya</i>           | Pernah                      | 5                | 23.8           |
|  | Tidak Pernah                | 16               | 76.2           |
|  | Total                       | 21               | 100.0          |

Sumber: data diolah (2020)

Mayoritas warga yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan adalah laki-laki sebanyak 12 dari 21 orang. Sedangkan dilihat dari jenis usahanya, warga yang datang rata-rata memiliki usaha di bidang usaha telur asin, usaha kerajinan, dan usaha peternakan. Sementara itu, warga masyarakat sebagian besar belum berpengalaman dalam mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran dana pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa sejumlah 76,2% warga tidak pernah membuat laporan penggunaan biaya, sedangkan warga masyarakat yang berpotensi mendapatkan anggaran dana kegiatan juga menghadiri kegiatan sosialisasi dan pelatihan, tetapi belum memutuskan alokasi penggunaan dana kegiatan tersebut.

Diskusi dan tanya jawab pelatihan memberikan informasi tambahan untuk memetakan kebutuhan warga masyarakat dalam pendampingan tindak lanjut pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan yang didapatkan. Dalam pelaksanaannya, warga masyarakat belum bisa mengatur kegiatan usaha dengan pelaksanaan pelaporan keuangan. Dengan demikian, warga harus menjalankan kegiatan usaha sambil berproses dalam pembuatan dan pelaporan penggunaan anggaran dana kegiatan.



**Gambar 1. Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan & Pelaporan Dana Kegiatan**

Merujuk pada Indardi (2018) dan Makrufi & Aliza (2018) yang menggunakan pelatihan pada metode pengabdianannya, pengabdian ini memberikan materi tentang pentingnya budaya akuntabilitas yang diimplementasikan dalam bidang usaha, pengenalan biaya-biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pembuatan laporan keuangan sederhana termasuk perhitungan laba bersih yang didapatkan dari hasil usaha. Selain itu, format bentuk laporan pertanggungjawaban dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibuat berdasarkan standar yang berlaku pada saat pelatihan dan dijadikan pedoman bagi seluruh bentuk usaha telur asin, kerajinan *sayangan*, dan peternakan *kampoeng bebek*.

### **3. Pendampingan dan Monitoring**

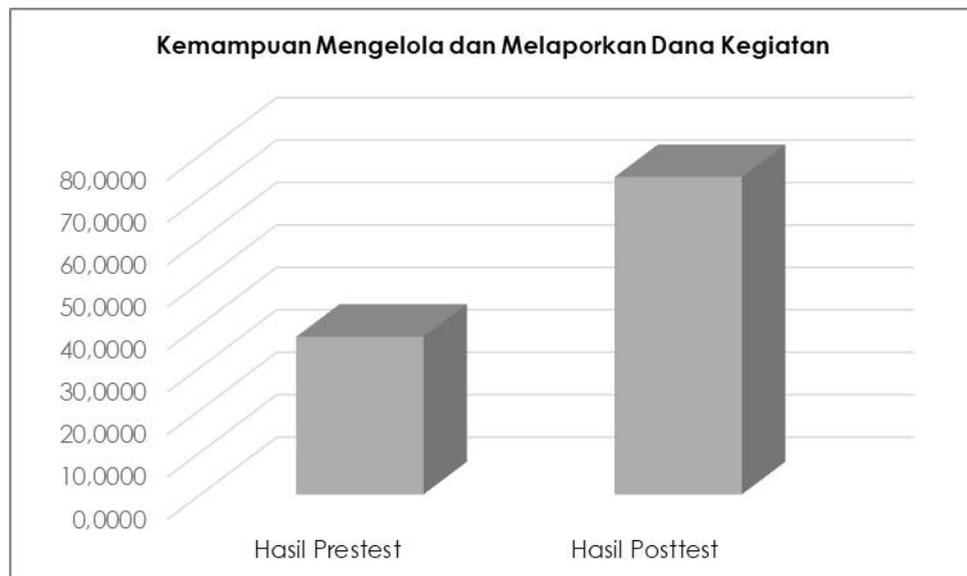
Pendampingan dan *monitoring* dilakukan secara acak dengan kegiatan kunjungan ke warga masyarakat dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan selama proses pendampingan dan *monitoring* di lapangan. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Kusumawati (2016) yang melakukan pendampingan pengolahan ubi ungu berbasis metode nilai tambah di Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Pada pengabdian ini, keberhasilan warga masyarakat dalam mengelola dan melaporkan bentuk kegiatan beserta anggaran dana yang telah diserap diukur dengan observasi langsung pada warga masyarakat dengan memberikan *feedback* berupa kuesioner *posttest* dan kuesioner tingkat kepuasan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan pelaporan anggaran dana kegiatan masyarakat.

**Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest**

| Paired Samples Statistics | Mean    | N  | Std. Deviation | Std. Error Mean | Correlation | Sig.  |
|---------------------------|---------|----|----------------|-----------------|-------------|-------|
| Hasil Pretest             | 37.1429 | 21 | 12.70545       | 2.77256         | 0.688       | 0.001 |
| Hasil Posttest            | 74.7619 | 21 | 10.77917       | 2.35221         |             |       |

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan adanya perbedaan kemampuan rata-rata sebelum dan setelah adanya sosialisasi dan pelatihan kegiatan pengelolaan pelaporan dana kegiatan masyarakat. Sementara itu, Gambar 2 menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata kemampuan warga masyarakat dalam mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



**Gambar 2. Peningkatan Warga Masyarakat dalam Mengelola dan Melaporkan Dana Kegiatan**

Peningkatan kemampuan warga masyarakat yang terjadi berdasarkan Gambar 2 di atas disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang antusias dalam memahami dan menerapkan pemahaman selama sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan dan pelaporan anggaran dana kegiatan masyarakat. Selain itu, pendampingan yang dilakukan secara visitasi langsung menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola dan melaporkan anggaran dana penggunaannya tumbuh dan berkembang (Muryati, 2016).

Di sisi lain, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan menunjukkan angka yang cukup memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.



**Gambar 3. Tingkat Kepuasan Warga terhadap Kegiatan Pengabdian**

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa hampir setengah lebih atau sebesar 62% warga masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan merasakan kepuasan atas kegiatan pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian menunjukkan bukti bahwa proses sosialisasi dan pelatihan serta bentuk pendampingan terhadap masyarakat akan pentingnya proses akuntabilitas dapat mendorong masyarakat untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Hal tersebut senada dengan studi yang dilakukan oleh Afriyanti, dkk. (2015) yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya tingkat kepuasan dalam bekerja adalah bagaimana seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk yang telah dikerjakannya. Sementara itu, kepercayaan dan komitmen dapat dibangun dari akuntabilitas seseorang (Junjunan, Asegaf, & Takwil, 2020).

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada warga masyarakat Desa Kebonsari tentang pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang positif karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan yang bersifat praktis dan aplikatif menunjukkan nilai yang memuaskan. Berdasarkan data yang ada, disebutkan bahwa 61,9% warga masyarakat Desa Kebonsari, Candi merasa bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengelolaan dan pelaporan dana desa ini mampu menambah wawasan mereka tentang bagaimana mengelola dan melaporkan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan hasil analisis *pretest* dan *posttest* yang menunjukkan adanya

peningkatan pemahaman warga desa terhadap pengelolaan dan pelaporan dana desa itu sendiri. Walaupun demikian, untuk mencapai hasil yang optimal, harapannya di masa yang akan datang, kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan *monitoring* bisa terus dilaksanakan dengan titik fokus yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh warga sehingga tingkat keterpahaman akan pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Kebonsari, Candi, Sidoarjo ini bisa terus ditingkatkan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus pemerintahan Desa Kebonsari beserta perangkat yang lain karena telah mengizinkan melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan kepada warga masyarakat setempat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rr. Dewi Irawati selaku istri Ketua BPD Desa Kebonsari yang memfasilitasi jalannya kegiatan sosialisasi dan pendampingan masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Annaj Thoriq selaku Sekretaris Desa dan Bapak Arifin selaku Pelaksana Tugas Desa Kebonsari yang menyediakan tempat guna kelancaran kegiatan sosialisasi dan pelatihan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, F. (2015). Memaknai Penyusunan dan Pelaporan Akuntansi pada Rumah Sakit Blu (Studi Kasus Rsup Dr. Mohammad Hoesin Palembang). *Akuntabilitas*, 9(1), 53–74. Retrieved from <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ja/article/view/8797>
- Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.10>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Budiman, H., Yusnaini, Y., & Relasari, R. (2019). Pengaruh Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*. <https://doi.org/10.29259/ja.v1i1.2.8935>
- Dwi Makrufi, A., & Fetri Aliza, N. (2018). Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Melalui Pelatihan Produksi Keranjang Salak. *BERDIKARI/ : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*. <https://doi.org/10.18196/bdr.6136>
- Indardi. (2018). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembuatan Keripik Singkong Di Semuluh Kidul, Semanu, Gunung Kidul. *BERDIKARI/ : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*. <https://doi.org/10.18196/bdr.6133>
- Junjuran, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Akuntansi/ : Jurnal Akuntansi Integratif*. <https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289>
- Kusumawati, R. (2016). Pendampingan Pengolahan Ubi Ungu Berbasis Value Added Method. *BERDIKARI/ : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*. <https://doi.org/10.18196/bdr.428>
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos pada SD

- Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Natawibawa, I. W. Y., Mulya, I. M. O., & Yoh, W. H. (2019). Transparency and Accountability as Determinants In The Financial Management Of Universities: A Study On State Universities In Malang City. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i1.247>
- Nurhakim, I., & Yudianto, I. (2018). Implementation of Village Fund Management. *Journal of Accounting Auditing and Business*, *12*, 39–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346>
- Pratiwi, D. N., & Mulasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Saud, I. M., & Trisha, G. F. (2020). Desentralisasi Fiskal, Politik Dinasti, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan: Bukti Empiris di Indonesia. *Akuntabilitas*. <https://doi.org/10.29259/ja.v14i1.11208>